

**PENGARUH BELANJA MODAL DAN DAU TERHADAP KEMANDIRIAN
KEUANGAN DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI BALI**

**Doni Azari¹
I Ketut Sutrisna²**

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia
e-mail: doniazari@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian dilakukan untuk periode 2013-2018 dengan jumlah sampel 8 kabupaten dan 1 kota. Jenis data dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder yang digunakan diperoleh melalui situs badan pusat statistik Provinsi Bali. Tujuan penelitian yang hendak dicapai: 1) untuk menganalisis pengaruh belanja modal dan dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. 2) untuk menganalisis pengaruh belanja modal, dana alokasi umum, dan kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. 3) untuk menganalisis pengaruh belanja modal dan dana alokasi umum melalui kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Teknik analisis yang digunakan analisis jalur dan hasil penelitian belanja modal dan dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Belanja modal dan dana alokasi umum tidak berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Belanja modal dan dana alokasi umum berpengaruh secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Kata kunci: *Belanja modal, dana alokasi umum, kemandirian keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi.*

ABSTRACT

The research was conducted for the 2013-2018 period with a sample size of 8 districts and 1 city. The type of data used in this research is secondary data. Secondary data used obtained the website of Bali Provincial Statistics Agency. Research objectives to be achieved: 1) to analyze the effect of capital expenditure and general allocation funds on regional financial independence in districts in Bali Province. 2) to analyze the effect of capital expenditure, general allocation funds, and regional financial independence on economic growth in districts in Bali Province. 3) to analyze the effect of capital expenditure and general allocation funds through regional financial independence on economic growth in districts in Bali Province. Analysis technique used is path analysis and the results of research on capital expenditures and general allocation funds have a significant positive effect on regional financial independence in districts in Bali Province. Capital expenditures and general allocations do not have a direct effect on economic growth, while regional financial independence has a significant positive effect on economic growth in districts in Bali Province. Capital expenditures and general allocation funds have an indirect effect on economic growth through regional financial independence in districts / cities in Bali Province.

Keywords: *Capital expenditures, general allocation funds, regional financial independence, economic growth.*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang akan mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat ekonomi berkelanjutan. Pembangunan wilayah Provinsi Bali merupakan pembangunan nasional yang melibatkan seluruh aspek kehidupan jasmani dan rohani, dengan tujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat serta kepribadian dan jati diri masyarakat lokal, regional dan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah secara bersama-sama mengambil langkah dalam pembangunan daerah (Permana, 2014). Kebijakan dan kepentingan pemerintah daerah dan sosial saat ini fokus pada ketimpangan antar daerah (Erawan, 2015). Di semua negara, derajat ketimpangan antarwilayah merupakan proses pertumbuhan, dan satu atau model pembangunan lainnya tidak dapat ditentukan (Antonescu, 2010). Oleh karena itu, melalui upaya pemerintah daerah diharapkan dapat tercapai pembangunan sosial ekonomi yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya (Akudugu, 2012).

Pembangunan ekonomi Indonesia sangat tergantung pada pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek (Suliswanto, 2010). Pembangunan ekonomi daerah adalah kerja sama yang dibangun antara pemerintah dan sektor swasta guna memanfaatkan sumber daya yang ada sehingga menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Tujuannya adalah dapat memberdayakan masyarakat sehingga mendapatkan pekerjaan. Pembangunan ekonomi daerah tidak lepas dari Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999, pemerintah pusat melimpahkan wewenang kepada daerah untuk mengatur daerahnya atau yang sering

disebut otonomi daerah (Suparmoko, 2002:4). Salah satu alasan dibentuknya otonomi daerah adalah daerah memaksimalkan potensi daerahnya sehingga pembangunan di pusat dapat berjalan seimbang dengan pembangunan di daerah.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia didasarkan pada UU. No. 32 Tahun 2004. Otonomi daerah atau sering disebut desentralisasi fiskal mengharuskan pemerintah daerah dan masyarakat bersama-sama membangun daerahnya sendiri. Bodman *et al.* (2009) menyatakan secara teoritis desentralisasi fiskal adalah devolusi tanggung jawab fiskal dan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dapat meningkatkan atau mengurangi pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk seluruh bidang pemerintahan kecuali politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, kebijakan fiskal dan moneter, agama (Suparmoko, 2002:17).

Setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatan nya, hal ini menimbulkan terjadinya ketimpangan fiskal antara daerah yang satu dengan daerah lainnya (Bendesa, 2020). Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, hal ini dilakukan untuk mengatasi ketimpangan fiskal yang terjadi didaerah yang satu dengan daerah yang lainnya.

Desentralisasi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih tinggi, dan karena itu dapat meningkatkan potensi untuk mengurangi kemiskinan (Miranti *et al*, 2014). Desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Kusuma, 2016). Kebijakan otonomi selain tercermin dari wewenang daerah mengatur keuangan dan pemanfaatan sumber daya daerah,

juga tercermin dari keterbukaan ekonomi daerah tersebut (Fajrii,dkk. 2016). Sehingga, dengan adanya otonomi daerah tersebut peran pemerintah dalam pembangunan di suatu daerah sangat penting (Nurudeen, 2010). Dengan sumber daya dan potensi yang terbatas, pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Berdasarkan pengertian yang dilakukan oleh Naftali (2010) dengan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap derajat desentralisasi fiskal, artinya bahwa setiap terjadinya peningkatan derajat desentralisasi fiskal yang dihitung dari penerimaan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pertumbuhan ekonomi adalah pengembangan kemampuan ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik, melalui upaya perencanaan dan pelaksanaan, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi tidak lepas dari peran pemerintah (Edogbanya, 2013). Pertumbuhan ekonomi secara umum didefinisikan sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 2006:9). Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya penambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, sosial dan teknik. Kaur (2016) menyatakan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan pengetahuan bukan hanya diatas faktor fisik, sehingga

perlu juga dilakukan peningkatan ilmu pengetahuan guna menunjang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari perspektif pertumbuhan ekonomi skala nasional ataupun skala daerah.

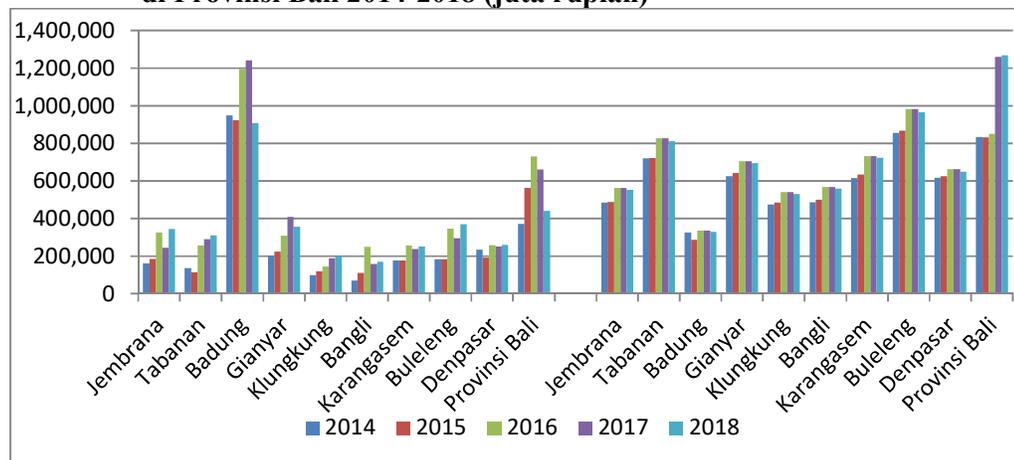
Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan salah satu syarat terjadinya peningkatan PDRB suatu daerah. Jika PDRB meningkat dari tahun sebelumnya, maka pertumbuhan ekonomi daerah dikatakan meningkat. PDRB juga merupakan penjumlahan dari nilai tambah yang diciptakan oleh semua kegiatan ekonomi di daerah. Dalam proses pertumbuhan, pembiayaan pemerintah melalui pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi (Dalamagas, 2010).

Belanja modal adalah komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap. Dalam perspektif kebijakan publik, sebagian besar belanja modal berhubungan dengan pelayanan publik, sehingga pada setiap anggaran tahunan jumlahnya semestinya relatif besar. Belanja modal mengacu pada belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang pendapatannya melebihi satu tahun anggaran akan menambah kekayaan atau kekayaan daerah, kemudian menambah belanja harian, seperti biaya pemeliharaan (Halim, 2012: 73). Belanja modal ditujukan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, gedung, infrastruktur dan aset tetap lainnya. Inuwa (2012) mengemukakan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan alat penting untuk mengendalikan perekonomian. Kinerja keuangan akan dipengaruhi oleh komponen-komponen yang termasuk dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk pendapatan dan belanja daerah. Dari sekian banyak komponen yang masuk dalam laporan APBD, kinerja keuangan diyakini akan dipengaruhi oleh belanja modal, dalam hal ini kinerja keuangan pemerintah akan meningkatkan produktivitas perekonomian (Wardana, 2014).

Menurut Andirfa (2016) dengan tersedianya infrastruktur yang baik dan mendukung dapat menciptakan efisiensi di berbagai sektor dan produktivitas masyarakat menjadi semakin

tinggi dan dengan terciptanya efisiensi tersebut akan dapat terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut berhubungan dengan kinerja keuangan, sejalan dengan yang dikatakan Halim (2012:126), gambaran kemandirian daerah dalam berotonomi dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan untuk daerah tersebut agar mampu membangun daerahnya, dan untuk bersaing secara sehat dengan daerah lainnya dalam mencapai otonomi yang sesungguhnya. Kemampuan setiap daerah tidak sama dalam mendanai berbagai kegiatan, hal ini menimbulkan adanya kesenjangan fiskal antar satu daerah dengan daerah lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Alokasi Umum (DAU) salah satu dana perimbangan dari pemerintah yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah. Dana Alokasi Umum merupakan penyangga utama pembiayaan APBD yang sebagian besar terserap untuk belanja pegawai, sehingga belanja untuk proyek-proyek pembangunan sangat berkurang. Berikut ini adalah gambar realisasi belanja modal dan dana alokasi umum pada kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2014-2018.

Gambar 1 Realisasi Belanja Modal Dan Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Bali 2014-2018 (juta rupiah)

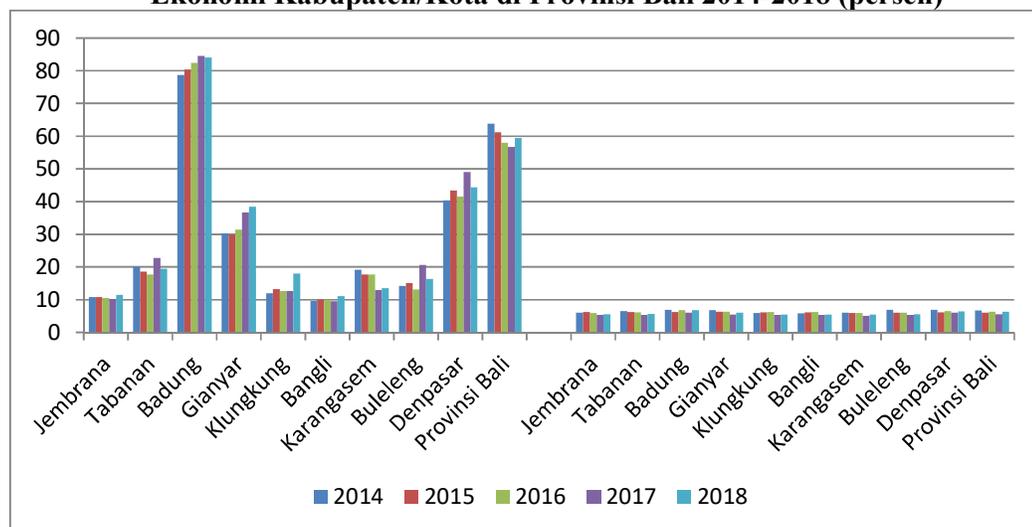


Sumber : BPS Provinsi Bali 2019

Pada Gambar 1 disebelah kiri yaitu belanja modal dan yang disebelah kanan adalah dana alokasi umum, pada gambar menunjukkan bahwa belanja modal yang dilakukan Pemerintah dan dana alokasi umum Provinsi Bali dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami fluktuasi. Kabupaten Badung meraih peringkat tertinggi dalam mengeluarkan belanja modal dan Kabupaten Buleleng sebagai kabupaten di Provinsi Bali yang memperoleh dana alokasi umum tertinggi. Sedangkan peringkat terendah yaitu Kabupaten Bangli dalam mengeluarkan belanja modal dan kabupaten Badung yang terendah memperoleh dana alokasi umum pada tahun 2018. Pengalokasian belanja modal ini dianggarkan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Menurut Halim (2004:150) kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian keuangan suatu daerah dapat diukur melalui pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga digunakan menanggulangi pertumbuhan ekonomi agar dapat berjalan dengan lebih baik. Gambar 2 menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2014-2018.

Gambar 2 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali 2014-2018 (persen)



Sumber : BPS Provinsi Bali 2019

Gambar 2 disebelah kiri yaitu tingkat kemandirian keuangan daerah dan disebelah kanan adalah laju pertumbuhan ekonomi, pada gambar menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2014 sampai dengan 2018 berfluktuatif tetapi cenderung mengalami peningkatan, begitu juga dengan laju pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu lima tahun terakhir kabupaten/kota di Provinsi Bali mengalami fluktuasi. Pada gambar menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi per kabupaten/kota di Provinsi Bali yang tertinggi yaitu Kabupaten Badung dan yang terendah yaitu Kabupaten Karangasem. Salih (2012) menyatakan pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember, hal ini merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam pengelolaanya yang harus tepat sasaran. Pemerintah daerah seharusnya dapat memberdayakan keuangan daerahnya dengan baik guna menunjang kesejahteraan masyarakatnya sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang baik.

Salah satunya pertumbuhan ekonomi dikatakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik. PDRB digunakan sebagai ukuran penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi pada era otonomi daerah. PDRB perkapita merupakan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dibagi jumlah penduduk di suatu daerah (KPPOD, 2002).

Perbedaan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di kabupaten/kota Provinsi Bali ditentukan oleh dua faktor yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia atau tenaga kerja, permodalan dan akumulasi modal, tenaga manajerial dan organisasi produksi, kemajuan teknologi dan pemanfaatan teknologi, pembagian kerja dan perluasan skala produksi. Faktor non-ekonomi

terdiri dari faktor sosial, faktor manusia dan faktor politik. Dari ke dua faktor tersebut salah satunya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Kedua faktor tersebut memiliki peranan yang sangat kuat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah.

Ada beberapa variabel yang berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi. Variabel tersebut antara lain belanja modal dan dana alokasi umum (DAU). Masalahnya sekarang adalah, bagaimanakah pengaruh belanja modal, dana alokasi umum dan kemandirian keuangan daerah memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali? Pertanyaan inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul “Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali”.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu : 1) Untuk menganalisis pengaruh belanja modal dan dana alokasi umum secara langsung terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali. 2) Untuk menganalisis pengaruh belanja modal, dana alokasi umum dan kemandirian keuangan daerah secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. 3) Untuk menganalisis pengaruh belanja modal dan dana alokasi umum secara tidak langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali.

KAJIAN TEORI

Belanja Modal

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sarana atau alat untuk menjalankan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta memberi isi dan arti

tanggung jawab Pemerintah Daerah karena APBD menggambarkan seluruh kebijaksanaan Pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang (APBD).

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahunan anggaran yang bersangkutan yang meliputi belanja rutin (operasional) dan belanja pembangunan (belanja modal) serta pengeluaran yang tidak terduga. Fazoranti (2012), mengatakan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi harus mengontrol pengeluaran langsungnya.

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang merupakan bagian dari rincian belanja langsung yang memiliki manfaat secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Halim (2004:73) menyebutkan bahwa manfaat dari belanja daerah melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran, Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Akonji et al. (2013) yang menyatakan belanja publik sebagian besar dikendalikan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi. Salih (2012), menambahkan bahwa pengeluaran publik harus digunakan tepat sasaran.

Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung, dan bangunan, peralatan dan aset tak terwujud. Dengan kata lain belanja modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk

biaya pemeliharaan sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Dana Alokasi Umum

DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. DAU yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan daerah yang dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Kebutuhan fiskal merupakan kebutuhan daerah dalam membiayai semua pengeluaran daerah dalam rangka menjalankan fungsi/kewenangan daerah di dalam melakukan penyediaan pelayanan publik. Tahapan-tahapan dalam penghitung DAU yaitu sebagai berikut (Farah, 2010).

1) Tahapan Akademis

Konsep awal penyusunan kebijakan atas impementasi formula DAU dilakukan oleh Tim Independen dari berbagai universitas dengan tujuan untuk memperoleh kebijakan perhitungan DAU yang sesuai dengan ketentuan UU dan karakteristik Otonomi Daerah di Indonesia.

2) Tahapan Administratif

Dalam tahapan ini Depkeu, DJPK melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyiapan data dasar perhitungan DAU termasuk didalamnya kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemutakhiran data yang akan digunakan.

3) Tahapan teknis

Merupakan tahap pembuatan simulasi penghitungan DAU yang akan dikonsultasi pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan formula DAU sebagaimana diamanatkan UU

dengan menggunakan data yang tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis.

4) Tahapan Politis

Merupakan tahap akhir, pembahasan penghitungan dan alokasi DAU antara pemerintah dengan Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR RI untuk konsultasi dan mendapatkan persetujuan hasil penghitungan DAU.

Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah, yang dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber daya ekstern. Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan asli daerah (Halim, 2007).

Ada empat macam pola yang memperkenalkan “hubungan situasional” yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah” (Halim, 2007). Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim (2001) mengemukakan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah antara lain: Pola hubungan

instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada pemerintah daerah. Pola hubungan konsultif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Pola hubungan partisipasif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati kemampuan untuk melaksanakan urusan otonomi daerah. Pola hubungan delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan dasar untuk pembangunan berkelanjutan. Pemerintah dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan memprioritaskan: perbaikan infrastruktur; peningkatan pendidikan; pelayanan kesehatan; membangun fasilitas yang dapat mendorong investasi baik asing maupun lokal; menyediakan perumahan dengan biaya rendah; melakukan restorasi lingkungan serta penguatan di sektor pertanian (Saad, 2009). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur status ekonomi suatu negara atau wilayah dan kemakmuran rakyatnya. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan proses peningkatan pendapatan daerah dari waktu ke waktu, dan menjadi indikator penting keberhasilan pembangunan suatu negara. Keberhasilan pembangunan yang dicapai akan membantu menentukan pembangunan di masa depan (Taufik et al., 2014). Pertumbuhan ekonomi juga didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara maupun daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktifitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu, karena pada

dasarnya aktifitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini nantinya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat (Basri, 2002:56)

Menurut Sukirno (2010:48), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Menurut Samuelson (dalam Alfian Wahyu Fauzan, 2015) ada empat faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi : (a) Sumber daya manusia. Kualitas input tenaga kerja, atau sumber daya manusia merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan ekonomi. Hal ini dikarenakan dalam suatu proses produksi, peran sumber daya manusia sangat vital yaitu sebagai tenaga kerja yang bertugas mengkombinasikan atau mengolah beberapa faktor produksi dalam kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Selain itu, sumber daya manusia juga berperan dalam penciptaan teknologi baru dan modern untuk mendukung pekerjaan dan mengoptimalkan hasil produksi. (b) Sumber daya alam. Faktor produksi kedua adalah tanah yang dapat ditanami merupakan faktor yang paling berharga. Selain tanah, sumberdaya alam yang penting antara lain minyak, gas, hutan, air tambang dan bahan-bahan mineral lainnya. (c) Pembentukan modal. Untuk pembentukan modal, diperlukan pengorbanan merupakan pengurangan konsumsi, yang mungkin berlangsung selama beberapa puluh tahun. Pembentukan modal dan investasi ini sebenarnya sangat dibutuhkan untuk kemajuan cepat di bidang ekonomi. (d) Perubahan teknologi dan inovasi. Salah satu tugas kunci pembangunan ekonomi adalah memacu semangat kewirausahaan. Perekonomian akan sulit untuk maju apabila tidak memiliki para wirausahawan yang bersedia menanggung resiko usaha dengan mendirikan berbagai pabrik atau fasilitas produksi, menerapkan teknologi baru, menghadapi berbagai hambatan usaha, hingga mengimpor berbagai cara dan teknik usaha yang lebih maju.

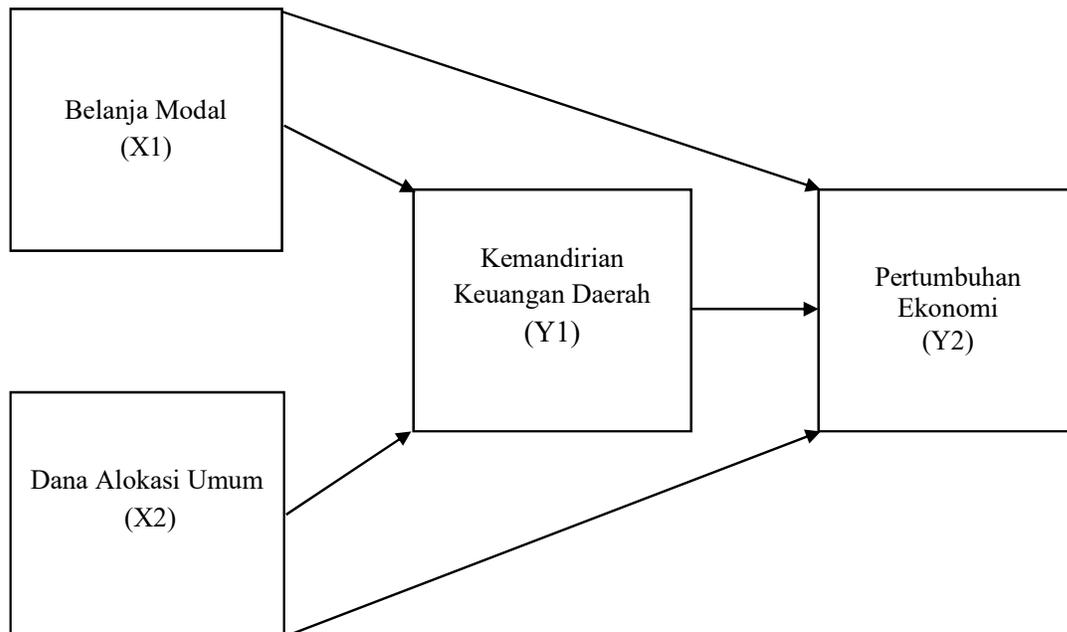
METODOLOGI PENULISAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian menurut tingkat eksplanasinya yakni penelitian asosiatif. Digunakan asosiatif karena menjelaskan hubungan antara variabel satu terhadap variabel lainnya. Penelitian ini berbentuk kuantitatif yang bersifat asosiatif yang mengungkapkan positif dan negatif suatu pengaruh atau hubungan antar variabel yang ditanyakan dalam angka – angka. Penelitian ini diambil dari tahun 2013-2018. Lokasi penelitian ini dilakukan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali dengan menggunakan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistika. Dipilihnya kabupaten/kota di Provinsi Bali sebagai lokasi penelitian ini karena adanya ketimpangan di dalam belanja modal dan dana alokasi umum sehingga mempengaruhi kemandirian keuangan daerah dan data yang diperoleh dari persentase laju pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali mengalami fluktuasi sehingga akan menimbulkan masalah yang lebih kompleks apabila laju pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali terjadi penurunan di tahun tertentu.

Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka angka dan dihitung dengan satuan hitung (Sugiyono, 2002:13). Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah belanja modal, dana alokasi umum, kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Data kualitatif merupakan data yang berupa penjelasan atau uraian. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa penjelasan atau keterangan tentang pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Berdasarkan sumber jenis data penelitian ini merupakan data sekunder adalah data yang di kumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain (sugiyono, 2012:15). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali dan instansi lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

Analisis jalur merupakan peluasan penerapan analisis regresi linear berganda untuk memprediksi hubungan sebab akibat antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori. Dalam analisis jalur, terdapat variabel yang berperan ganda yaitu sebagai variabel eksogen pada suatu hubungan, namun juga menjadi variabel dependen pada hubungan lain. Variabel ini disebut dengan variabel mediasi (intervening). Variabel mediasi merupakan variabel penyalah atau mediator antara variabel independen dengan variabel dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi variabel dependen (Utama, 2016:159).

Peneliti menggunakan teknik analisis data yaitu teknik analisis jalur (path analysis) dengan menguji pengaruh langsung dan tidak langsung masing-masing variabel terhadap variabel terikat disertai dengan uji sobel. Analisis jalur dipergunakan karena di dalam penelitian ini dirancang untuk menafsir hubungan kualitas pada variabel terhadap teori. Di dalam penelitian ini terdapat 1 variabel terikat, 1 variabel intervening dan 2 variabel bebas. Secara sistematis kerangka konseptual penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3 Kerangka Konseptual Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Kerangka konseptual dalam penelitian ini menganalisis pengaruh belanja modal dan dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi dalam bentuk persentase laju pertumbuhan ekonomi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah belanja modal disetiap daerahnya dan dana alokasi umum dana alokasi umum di setiap daerahnya. Variabel intervening yang digunakan adalah kemandirian keuangan daerah.

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2000:189).

Menurut Halim (2007:265) salah satu pengeluaran pemerintah adalah belanja modal yang memiliki pengertian pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal termasuk: belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya. Nworji dkk. (2012) menyimpulkan bahwa distribusi belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Chinweoke dkk. (2014) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan pemerintah daerah dalam belanja modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya

peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002). Wong (2004) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Selain itu, bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan pendapatan asli daerah (Harianto dan Adi, 2007).

DAU memberikan pengaruh yang lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap belanja daerah yang artinya kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh DAU daripada PAD. Hal ini dapat dikatakan peran DAU dan PAD sangat berpengaruh terhadap kemandirian daerah. Apabila DAU suatu daerah kecil maka kemandirian daerah akan semakin besar, karena daerah sudah dapat meningkatkan peran PAD dalam total penerimaan APBD. Apriana (2010) tentang analisis hubungan antara belanja modal, DAU, kemandirian daerah dan pertumbuhan ekonomi. DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka desentralisasi. Menurut Rumanti (2009) lemahnya perencanaan pengalokasian belanja memunculkan ketidakefisienan kinerja pemerintahan, sehingga ada unit kerja yang kelebihan pembiayaan, ada pula unit kerja yang kekurangan pembiayaan. Hal ini akan berdampak pada perekonomian daerah umumnya dan keuangan daerah pada khususnya.

Menurut Wong (2004) pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal ini mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik. Rasio kemandirian berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan semakin besar PAD yang diperoleh serta semakin kecil pinjaman dan bantuan dari pusat, maka semakin mandiri daerah tersebut. Dengan semakin mandiri daerah tersebut, maka pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dapat mengalami peningkatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Jalur (Path Analysis)

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan jalur untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh belanja modal, dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota pada Provinsi Bali. Perhitungan koefisien analisis jalur dilakukan dengan analisis regresi melalui software IBM SPSS Statistics 20.0 memperoleh hasil yang ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 1 Hasil Analisis Jalur Persamaan Regresi 1 (Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah)

Model	R Square	Standardized Coefficients Beta	Sig.
Belanja Modal (X1)	0,491	0,662	0,000
Dana Alokasi Umum (X2)		0,293	0,029

Sumber: Olah Data SPSS

Berdasarkan hasil analisis jalur substruktural 1 yang disajikan pada Tabel 1 di atas, maka persamaan strukturalnya adalah:

$$Y1 = \beta_1 X1 + \beta_2 X2 + e_1$$

$$Y1 = 0,662X1 + 0,293X2 + e_1$$

Tabel 2 Hasil Analisis Jalur Persamaan Regresi 2 (Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi)

Model	R Square	Standardized Coefficients Beta	Sig.
Belanja Modal (X1)	0,286	0,312	0,011
Dana Alokasi Umum (X2)		0,319	0,009
Kemandirian Keuangan Daerah (Y1)		0,260	0,000

Sumber: Olah Data SPSS

Berdasarkan hasil analisis jalur substruktural 2 yang disajikan pada Tabel 2 di atas, maka persamaan strukturalnya adalah:

$$Y2 = \beta_3 X1 + \beta_4 X2 + \beta_5 Y1 + e_2$$

$$Y_2 = 0,312X_1 + 0,319X_2 + 0,260Y_1 + e_2$$

Pengaruh belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Berdasarkan hasil analisis pengaruh belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah, diperoleh nilai koefisien beta sebesar 0,662 yang berarti adanya arah yang positif serta nilai signifikansi sebesar 0,000 yang kurang dari 0,05 berarti adanya pengaruh yang signifikan. Hasil ini mengindikasikan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Sebuah Pemerintah Daerah dengan kualitas layanan publik yang memuaskan selalu diikuti dengan tingginya partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang dicerminkan dengan tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemda menggunakan PAD tersebut untuk belanja daerahnya termasuk belanja modal. Belanja modal kemudian diwujudkan ke dalam pembangunan daerah dan perbaikan daerah di berbagai sektor. Dengan demikian belanja modal dapat mempengaruhi tingkat kemandirian daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh secara signifikan positif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizky dan Suryo (2009) yang menemukan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Tingkat kemandirian keuangan daerah ditunjukkan dengan kontribusi PAD untuk membiayai belanja-belanja daerahnya termasuk belanja modal. Apabila pembiayaan belanja modal sebagian besar berasal dari PAD maka dapat dikatakan daerah tersebut mandiri, karena daerah tersebut tidak mengandalkan pembiayaan belanja modal dari pemberian transfer pemerintah pusat.

Pengaruh dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Berdasarkan hasil analisis pengaruh dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah, diperoleh nilai koefisien beta sebesar 0,293 yang berarti adanya arah yang negatif

serta nilai signifikansi sebesar 0,029 yang kurang dari 0,05 berarti adanya pengaruh yang signifikan. Hasil ini mengindikasikan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Menurut Sidik (2004) distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar. Hal ini kemungkinan disebabkan karena PAD daerah tersebut kecil sehingga pemerintah pusat perlu mengalokasikan dana kepada daerah tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh secara signifikan negatif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muliana (2009) menjelaskan bahwa DAU berpengaruh signifikan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa DAU berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Jika DAU yang dialokasikan pemerintah pusat ke daerah relatif besar maka daerah tersebut dikatakan kurang mandiri karena daerah tersebut masih mengandalkan dana dari pemerintah pusat sebagai penerimaan utamanya. Pemberian transfer seperti DAU seharusnya hanya bersifat mendukung bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Semakin kecil DAU dalam menopang pembiayaan daerah diharapkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemberian transfer pemerintah pusat akan semakin rendah sehingga kemandirian daerah akan terwujud.

Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Berdasarkan hasil analisis pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi, diperoleh nilai koefisien beta sebesar 0,312 yang berarti adanya pengaruh yang positif serta nilai signifikansi sebesar 0,011 yang kurang dari 0,05 berarti adanya pengaruh yang signifikan. Hasil ini mengindikasikan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Todaro (2006) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki tiga faktor atau komponen utama. Pertama, akumulasi modal mencakup berbagai bentuk investasi baru di tanah, peralatan berwujud, dan sumber daya manusia. Kedua, pertumbuhan penduduk, yang mendorong pertumbuhan angkatan kerja dalam beberapa tahun mendatang. Ketiga, kemajuan teknologi. Aktiva tetap yang dimiliki sebagai akibat dari belanja modal menjadi dasar utama bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik. Dalam rangka meningkatkan aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana guna kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan fasilitas umum. Dengan peningkatan pengeluaran pemerintah, khususnya belanja modal diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat yang pada gilirannya dapat memacu pertumbuhan pendapatan perkapita.

Sejalan dengan penelitian Sodik (2007) dengan hasil kesimpulan adanya pengaruh positif yang signifikan atas pengeluaran pemerintah baik pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin terhadap pertumbuhan ekonomi regional dikarenakan pengeluaran pembangunan sangat diperlukan oleh suatu daerah untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya maka dapat disimpulkan belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Berdasarkan hasil analisis pengaruh dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi, diperoleh nilai koefisien beta sebesar 0,319 yang berarti adanya arah yang positif serta nilai signifikansi sebesar 0,009 yang kurang dari 0,05 berarti adanya pengaruh yang signifikan. Hasil ini mengindikasikan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Angka ini menunjukkan bahwa dana alokasi umum memiliki pengaruh tingkat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 31,9 persen, sedangkan 9 persen dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan bertambahnya dana alokasi umum maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan adanya dana alokasi umum maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Hasil pengujian ini sejalan dengan hasil penelitian Maryati dan Endrawati (2010) yang menemukan bahwa DAU berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

Pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Berdasarkan hasil analisis pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, diperoleh nilai koefisien beta sebesar 0,260 yang berarti adanya arah yang positif serta nilai signifikansi sebesar 0,000 yang kurang dari 0,05 berarti adanya pengaruh yang signifikan. Hasil ini mengindikasikan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Angka ini menunjukkan kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh tingkat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 26 persen. Ini berarti semakin banyak kemandirian keuangan daerah dengan serta merta akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Uji Sobel Untuk Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Kemandirian Keuangan Daerah

Perhitungan uji Sobel untuk pengaruh tidak langsung antara belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kemandirian keuangan daerah dihitung sebagai berikut:

$$Z = \frac{ab}{\sqrt{b^2S_a^2 + a^2S_b^2 + S_a^2S_b^2}}$$

$$Z = \frac{0,662 \times 0,260}{\sqrt{0,260^2 \times 0,113^2 + 0,662^2 \times 0,095^2 + 0,113^2 \times 0,095^2}}$$

$$Z = \frac{0,17212}{0,07024}$$

$$Z = 2,450$$

Bersumber dari perhitungan mempergunakan uji sobel, didapatkan nilai z hitung sebesar 2,450 yang artinya lebih besar dari nilai z tabel (2,450 > 2,008). Hasil ini memiliki arti bahwa kemandirian keuangan daerah mampu memediasi secara signifikan pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Uji Sobel Untuk Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Kemandirian Keuangan Daerah

Perhitungan uji Sobel untuk pengaruh tidak langsung antara dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kemandirian keuangan daerah dihitung sebagai berikut:

$$Z = \frac{ab}{\sqrt{b^2S_a^2 + a^2S_b^2 + S_a^2S_b^2}}$$

$$Z = \frac{0,293 \times 0,260}{\sqrt{0,260^2 \times 0,075^2 + 0,293^2 \times 0,095^2 + 0,075^2 \times 0,095^2}}$$

$$Z = \frac{0,07618}{0,03472}$$

$$Z = 2,194$$

Bersumber dari perhitungan mempergunakan uji sobel, didapatkan nilai z hitung sebesar 2,194 yang artinya lebih besar dari nilai z tabel (2,194 > 2,009). Hasil ini memiliki arti bahwa kemandirian keuangan daerah mampu memediasi secara signifikan pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan uraian sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut. 1) belanja modal berpengaruh positif (signifikan) terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2013 sampai 2018. Dana alokasi umum berpengaruh negatif (signifikan) terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2013 sampai 2018. 2) belanja modal dan dana alokasi umum tidak berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif (signifikan) terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2013 sampai 2018. 3) belanja modal dan dana alokasi umum berpengaruh secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2013 sampai 2018.

Berdasar simpulan tersebut saran yang dapat diberikan peneliti antara lain : 1) Disarankan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Bali Supaya memprioritaskan alokasi belanja modal dan DAU pada bidang-bidang yang langsung bersentuhan dengan kepentingan publik, seperti infrastruktur atau fasilitas-fasilitas yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. 2) Disarankan kepada masing-masing daerah kabupaten/kota Provinsi Bali untuk lebih menggali potensi daerahnya masing-masing sehingga keuangan daerah yang ada dapat digunakan pada potensi yang tepat, guna menunjang pertumbuhan ekonomi pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali.

REFERENSI

- Akonji, D. A., Olubukola, O. A., And Wakilia, A. M. 2013. Nexus Between Publik Expenditure And Economic Growth By Testing Wagner's Law Time Series: Evidence From Nigeria. *International Journal Of Development And Sustainability*. 2(4). Hal: 2383-2395.
- Akudugu, Jonas Ayaribilla. 2012. Accountability In Local Government Revenue Management: Who Does What?. *Journal Of Sustainable Development*. 2(8). Hal: 22-23
- Andirfa, Mulia. 2016. Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh. Tesis. Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh.
- Antonescu, Daniela. 2010. The Analysis Of Regional Disparities In Romania With Gini/Struck Coefficients Of Concetration. *Scientific Researcher*, 2(40). Hal: 161-183
- Apriana, Dina. dan Suryanto, Rudi. 2010. "Analisis Hubungan Antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)". *Jurnal Akuntansi dan Investasi*. Vol. XI No. 1, Januari.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Provinsi Bali Dalam Angka 2018. Denpasar: BPS Bali
- Basri, Faisal. 2002. *Perekonomian Indonesia: Tantangan Dan Harapan Bagi Kebangkitan Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Bendesa, I K. G, Wiwin Setyari, Ni Putu. 2020. Kebijakan Fiskal Dalam Trend Pembangunan Ekonomi Jangka Panjang Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 13(1), Hal: 1-31.
- Bodman, P., Kelly Ana Heaton and Andrew Hodge. 2009. Fiscal Decentralisation and Economic Growth: A Bayesian Model Averaging Approach. MRG@UQ Discussion Paper, School of Economics. University of Queensland.
- Dalamagas, Basil. 2010. Public Sector And Economic Growth: The Greek Experience. *Bulletin Of Indonesian Economic Studies*. 32(3). Hal: 277-288.
- Edogbanya, Adejoh. 2013. Revenue Generation: Impact On Government Developmental Effort (A Study Of Selected Local Council In Kogi East Senatorial District). *Global Journal Of Management And Business Research*. 13(4). Ha: 12-26.
- Fajri, Muhammad, Arman Delis Dan Yohanes Vyn Amzar. 2016. Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi Dan Keterbukaan Daerah Terhadap Ketimpangan Wilayah Di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 9(2). Hal: 99-107.

- Farah Marta Yovita. 2010. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pngalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Se Indonesia Periode 2008-2010). Jurnal Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Fasoranti, Mary Modupe. 2012. The Effect Of Government Expenditure On Infrastructure On The Growth Of The Nigeria Economy, 1997-2009. *International Journal Of Economic And Financial Issues*. 2(4). Hal: 513-518.
- Fauzan, Alfian Wahyu. (2015). Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013). Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomika Dan Bisnis. Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2001. "Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah". Yogyakarta. UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Saemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2012. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Harianto, David, dan Priyo Hari Adi. 2007. "Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita". Makalah Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar 26-28 Juli 2007.
- Inuwa, Nasiru. 2012. Government Expenditure And Economic Growth In Nigeria: Cointegration Analysis And Causality Testing. *Academic Research International*. 2(3). Hal: 718-723.
- Irawan, Andi. 2015. Regional Income Disparities In Indonesia: Measurements, Convergence Process, And Decentralisation. *Bulletin Of Indonesian Economic Studies*, 51(1). Hal: 148-149.
- Kaur, masjinder. 2016. Knowledge in the economic growth of developing economies. *Bulletin Of Indonesian Economic Studies*.8(2). Hal: 205-212.
- KPPOD Tim Peneliti. 2002. Pemingkatan Daya Tarik Investasi 134 Kabupaten/Kota di Indonesia. Laporan Pelaksanaan Pemantauan Otonomi Daerah. Jakarta.
- Kusuma, Hendra. 2016. Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 9(1) Hal: 1-88.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi
- Maryati, U. dan Endarwati, 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi; Studi Kasus di Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. Vol. 5, No. 2. Hal: 68-84.

- Miranti, Riyana, Alan Duncan, And Rebecca Casells. 2014. Revisiting The Impact Of Concumtion Growth And Inequality On Proverty In Indonesia During Decentralisation. *Bulletin Of Indonesian Economic Studies*. 50(3). Hal: 461-482.
- Muliana. 2009. Pengaruh Rasio Efektivitas PAD, DAU, dan DAK terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
- Naftali Mansim. 2010. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Barat. *Jurnal. Lensa Ekonomi*. Vol. 4 No. 2 (2010). Universitas Gadjah Mada.
- Nurudeen, A, And Usman, A. 2010. Government Expenditure And Economic Growth In Nigeria, 1970-2008. A Disaggregate Analysis. *Business And Economic Journal*. 4. Hal: 1-11.
- Nworji, I. D., Okwu, A. T., Tomothy C, O., And Nworji. L. O. 2012. Effects Of Publik Expenditure On Economic Growth In Nigeria: A Disaggregated Time Series Analysis. *International Journal Of Management Science And Business Research*. 1(7). Hal: 1-15.
- Permana, I Gusti Agung Bagus Ari Surya. 2014. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dan Tingkat Upah Terhadap Kesempatan Kerja Melalui Investasi Di Provinsi Bali Tahun 1993-2013. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(4). Hal: 230-242.
- Rumanti, Indah Ari., 2009, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengalokasian Belanja Modal sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa dan Bali". Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UMY.
- Saad, W. dan Kamel Kalakech, 2009. The Nature of Government Expenditure and its Impact on Sustainable Economic Growth. *Middle Eastern Finance and Economics*. Vol. 1, No. 4. Hal: 39-47.
- Salih, Mohame Abdel Rahman. 2012. The Relationship Between Economic Growth And Government Expenditure: Evidence From Sudan. *International Business Reasearch*. 5(8). Hal: 40-46.
- Sukirno, Sadono. (2004). *Teori Pengantar Makroekonomi*. Jakarta: PT. Raja.Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Makro Ekonomi Modern*. Kencana.
- Sukirno, Sadono. 2010. *Makro Ekonomi, Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik untuk Keuangan & Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi, 2002.
- Taufik, Muhammad, Eny Rochaida Dan Fitriadi. 2014. Pengaruh Investasi Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 7(2). Hal: 90-101.

Pengaruh Belanja Modal Dan Dau Terhadap Kemandiria [Doni Azari, I Ketut Sutrisna]

Todaro, Michael P. and Stephen C. Smith. 2006. Economic Development. 9th Edition. New York: Pearson Addison Wesley.

Utama, Made Suyana.2016. Aplikasi Analisis Kuantitatif Untuk Ekonomi Dan Bisnis. Denpasar: CV Sastra Utama.

Wardana, Rangga.2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modal Terhdap PDRB (Studi Kasus Provinsi Sumatera Barat). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat.

Wong, John D. 2004. "The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity". Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management. p. 413-423.